

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun kepada Bupati dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja . Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata cara penyusunan dokumen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, monitoring, dan evaluasi mengalami perkembangan menuju era transparansi, akuntabel, kapabel, dan efisien. Laporan tersebut harus dibuat sebagai rangkaian kelanjutan dari dokumen yang sebelumnya sudah dibuat mulai dari perencanaan (Renstra, RKT, Renja, KUA PPAS), pelaksanaan (DPA) serta Penetapan Kinerja (PK).

B. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja SKPD dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan setiap tahunnya dan sudah diwujudkan/ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sehingga bisa dijadikan dasar penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun

berikutnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

D. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengampu 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Industri dan Urusan Transmigrasi dengan tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketenagakerjaan, Industri dan Ketransmigrasian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan".

Adapun Fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
 - b. Seksi Transmigrasi
5. Bidang Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Logam, Kimia dan Elektronika
 - b. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka.

- c. Seksi Industri Makanan dan Minuman.
- 6. UPT Balai Latihan Kerja
 - a. Kasubag Tata Usaha
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Penyuluh Perindag.
 - b. Pengantar Kerja.
 - c. Mediator Hubungan Industrial.
 - d. Penggerak Swadaya Masyarakat.
 - e. Insruktur
 - f. Arsiparis
 - g. Pranata Komputer
- 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 3. UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 4. Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah sebagaimana terlampir. Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang (termasuk UPT BLK) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai sumber daya aparatur sebagai berikut :

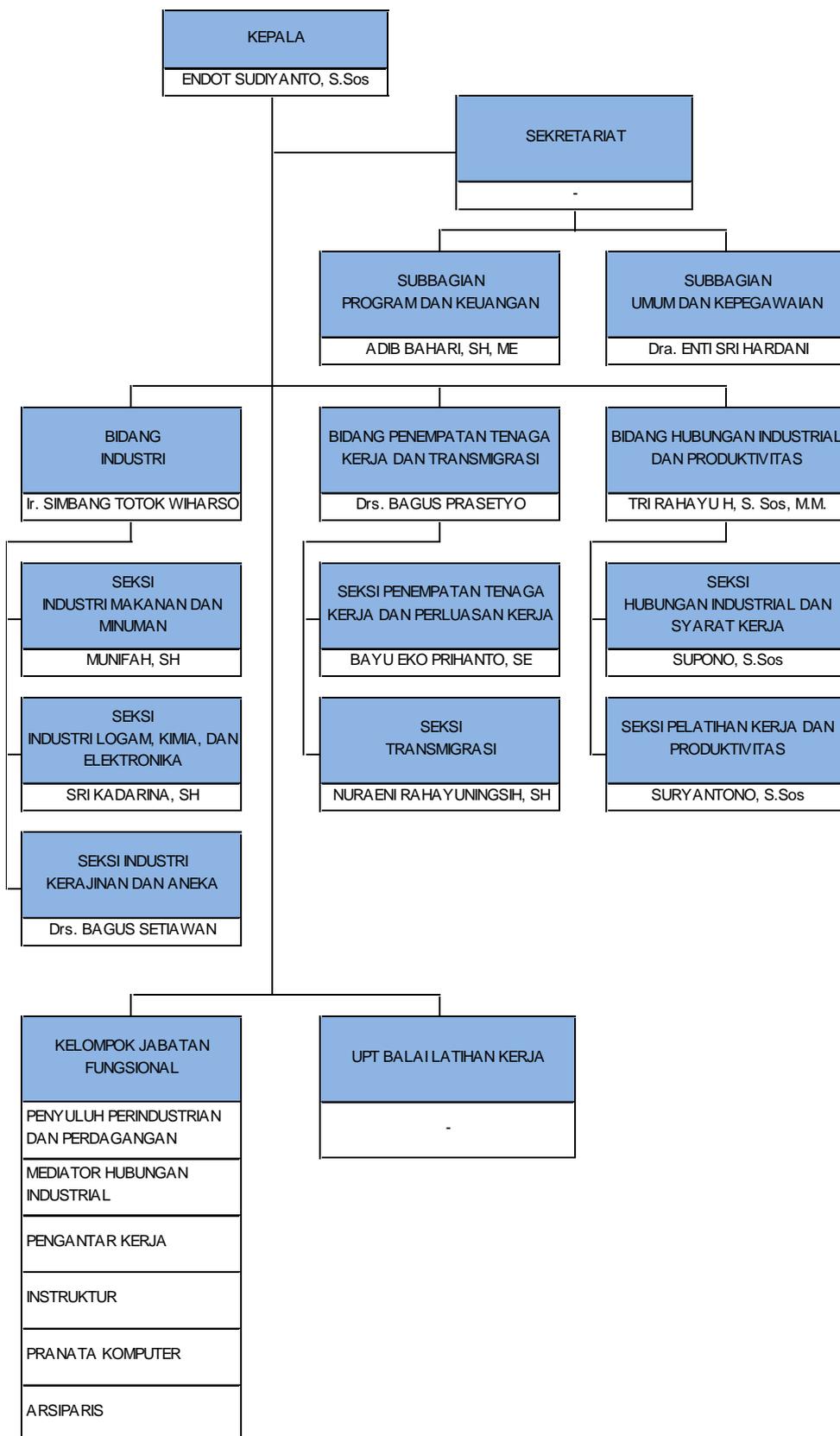
a.	Berdasarkan Jabatan	
	1. Kepala (Eselon II.b)	: 1 orang
	2. Sekretaris (Eselon III.a)	: - orang
	3. Kepala Bidang (Eselon III.a)	: - orang
	4. Kepala Bidang (Eselon III.b)	: 3 orang
	5. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a)	: 2 orang
	6. Kepala BLK (Eselon IV.a)	: - orang
	7. Kepala Sub Bidang (Eselon IV.a)	: 7 orang
	8. Kepala Subbag TU BLK (Eselon IV.b)	: 1 orang
	9. Pejabat Fungsional Khusus	: 41 orang
	10. Pejabat Fungsional Umum	: <u>19 orang</u>
	Jumlah	: 74 orang

b.	Berdasarkan Golongan/ruang :	
	1. Gol. Ruang IV.c	: 1 orang
	2. Gol. Ruang IV.b	: 8 orang
	3. Gol. Ruang IV.a	: 3 orang
	4. Gol. Ruang III.d	: 23 orang
	5. Gol. Ruang III.c	: 10 orang
	6. Gol. Ruang III.b	: 18 orang
	7. Gol. Ruang III.a	: 5 orang
	8. Gol. Ruang II.d	: 3 orang
	9. Gol. Ruang II.c	: 2 orang
	10. Gol. Ruang II.b	: 2 orang
	11. Gol. Ruang II.a	: <u>1 orang</u>
	Jumlah	: 74 orang

c.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	1. Pasca Sarjana	: 3 orang
	2. Sarjana	: 46 orang
	3. Sarjana Muda	: 8 orang

- 4. SLTA : 16 orang
- 5. SLTP : 1 orang
- Jumlah : **74 orang**

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGELANG**



E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mempunyai aspek strategis atau peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Magelang yang "Semanah", diantaranya melalui kegiatan:

1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.
2. Pembinaan Hubungan industrial yang harmonis diantara pekerja dan pengusaha dan pemerintah (Tripartit).
3. Mengatasi permasalahan penyebaran serta peningkatan kesejahteraan penduduk lewat program transmigrasi.
4. Mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah.

F. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai dinas pengampu urusan ketenagakerjaan, industri dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi.
2. Pendidikan formal yang dimiliki pencari kerja/penganggur yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada mengakibatkan masih rendahnya penempatan tenaga kerja.
3. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang belum sesuai harapan.
4. Kasus TKI yang masih terus terjadi.
5. Animo atau minat masyarakat terhadap transmigrasi tinggi akan tetapi kouta atau jatah penempatan dari pusat sangat sedikit/terbatas.
6. Masih terbatasnya kapasitas SDM di level manajerial dan menurunnya kualitas SDM terampil di level proses produksi.
7. Kurangnya daya saing produk industri kecil.

8. Kurang adanya keterkaitan antar rantai nilai (bahan baku, proses produksi, dan promosi/pemasaran).

G. Sitematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

b. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
5. Analisis dan efisiensi sumberdaya.
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

d. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang telah melaksanakan semua program dari 12 (dua belas) program utama dalam Rencana Strategik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dua belas program utama tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai 5 (lima) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2014-2019.

Berdasarkan Visi Bupati, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mempunyai **Misi** untuk mencapai visi dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM di sektor Industri
2. Mengembangkan industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing global.
3. Mengembangkan industri berwawasan lingkungan hidup.
4. Mengembangkan informasi ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan penempatan dan memperluas kesempatan kerja serta berusaha;
5. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas Tenaga Kerja;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang;
7. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha;
8. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan calon transmigran.

Tujuan, Sasaran dan Program 2014-2019

Tujuan	Sasaran	Program
1. Meningkatkan pelayanan aparatur kepada masyarakat	A. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; cakupan pelayanan administrasi PAK; cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan penempatan dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.	B. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka memasuki pasar kerja dan tenaga kerja mandiri.	C. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.	D. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5. Memfasilitasi perpindahan penduduk melalui peningkatan kuota transmigrasi melalui peningkatan kerjasama antara daerah asal dan daerah tempatan transmigran.	E. Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penduduk miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
6. Berkembang nya industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing global	F. Mewujud kan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, SDM, dan regulasi yang mendukung sektor industri daerah

Setiap sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019, kemudian dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Setelah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 dievaluasi dari aspek anggarannya, proses dilanjutkan hingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2017. Langkah selanjutnya yang ditempuh yaitu menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan menyiapkan Rencana Operasional Kegiatan (RKO) tahun 2017.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi kepada hasil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang telah mencanangkan Penetapan Kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.

Untuk tahun 2017 ini bentuk Dokumen Penetapan Kinerjanya terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2016 adalah sebagai berikut :

Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; cakupan pelayanan administrasi PAK; cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%
		Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
		Cakupan perencanaan pembangunan SKPD	100%
2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	3.160 orang
		Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	12.389 buruh
3	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan social dan penduduk miskin	Besaran transmigran yang ditempatkan	25 KK
4	Menguatnya daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.391 UKM
		Persentase usaha mikro dan kecil	0,36%
5	Mewujudkan industry daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	2,81%
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	18,11%
		Pertumbuhan industri	3,76%

No.	Nama Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.900.000	APBD II
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.092.953.000	APBD II
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	39.759.000	APBD II

Aparatur			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	APBD II
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	27.500.000	APBD II
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.936.414.000	APBD II
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.562.142.000	APBD II
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288.759.000	APBD II
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	80.180.000	APBD II
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	170.000.000	APBD II
11	Program Penataan Struktur Industri	70.292.000	APBD II
12	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1.230.893.000	APBD II
13	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	335.002.000	APBD II
14	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	516.540.000	APBN
	JUMLAH	7.775.334.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bab III Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja”. Dalam Pengukuran Kinerja, pelaksanaannya berpedoman pada Penetapan Kinerja yang telah dibuat pada awal tahun anggaran setelah APBD ditetapkan/ disahkan bersama dengan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk selanjutnya hasil pengukuran kinerja tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2016 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2.

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang telah melaksanakan 13 (tiga belas) program utama dalam Rencana Strategik (Renstra) 2014-2019. Tiga belas program utama tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai 5 (lima) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung

pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperinnaker 2014-2019.

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang capaian	Kategori Capaian
1.	Capaian 100%	Memuaskan
2.	85% capaian < 100	Sangat Baik
3.	70% capaian < 85%	Baik
4.	55% capaian < 70%	Cukup
5.	Capaian < 55%	Kurang

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Disperinnaker sebesar 100.74 persen dengan rincian enam indikator kinerja mencapai 100% (memuaskan), satu indikator kinerja mencapai di atas 85% (sangat baik) dan empat indikator kinerja capaiannya dibawah 80%. Keberhasilan ini didukung oleh penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan semangat dari pegawai Disperinnaker melaksanakan kegiatan.

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	4	4
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan peningkatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	116.52%	116.52%

	sarana dan prasarana aparatur; cakupan pelayanan administrasi PAK; cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100.08%	100.08%
		Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	94.23%	94.23%
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	100%	100%
		Cakupan perencanaan pembangunan SKPD	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	3.160	1.749	55.35%
		Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun	12.389	12.389	100%
3	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penduduk miskin	Besaran transmigrasi yang ditempatkan	5 KK	3 KK	60%
4	Mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	2,81%	0.72%	25.62%
		Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	18,11%	19.38%	107.01%
		Pertumbuhan industri	3,76%	2.88%	76.60%

2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja capaiannya tetap, delapan indikator kinerja mengalami penurunan capaian kerjanya.

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017
1	2	3	4	4
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; cakupan pelayanan administrasi PAK; cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	108.90%	116.52%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	104.35%	100.08%
		Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	93.69%	94.23%
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100.00%	100.00%
		Cakupan perencanaan pembangunan SKPD	100.00%	100.00%
2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	113.5%	55.35%
		Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun	12.389	100%
3	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penduduk miskin	Besaran transmigransi yang ditempatkan	100.00%	60.00%
4	Mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	23.13%	25.62%
		Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	98.41%	107.01%
		Pertumbuhan industri	97.61%	76.60%

3. Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun 2017 dengan target Renstra

Capaian Realisasi Kinerja Disperinnaker sampai dengan tahun 2017 terhadap target Renstra 2014-2019, ada sembilan indikator kinerja yang capaian kerjanya di atas 50% dan dua indikator kinerja masih dibawah

50%. Kegagalan pencapaian program kurang dari 50% disebabkan karena ada beberapa pejabat fungsional tertentu yang pensiun.

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI KINERJA S.D 2017
1	2	3	4	4
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; cakupan pelayanan administrasi PAK; cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	71.08%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	119.65%
		Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	39.15%
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	66.67%
		Cakupan perencanaan pembangunan SKPD	100%	140.91%
2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%	98.48%
		Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun	100%	69.44%
3	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penduduk miskin	Besaran transmigransi yang ditempatkan	100%	71.12%
4	Mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	16,83	33,21%
		Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	17,95	104,74%
		Pertumbuhan industri	3,76	207,45%

B. Realisasi Anggaran.

Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang melaksanakan dua belas program dan tiga puluh delapan kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 7.799.539.00

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	446.930.000	433.884.867	97,08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.000.000	40.103.050	97,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.700.000	81.103.050	93,89
Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.900.000	69.538.700	99,48
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	179.330.000	173.189.560	96,58
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	70.000.000	69.653.400	99,50
Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.372.897.000	1.208.567.545	88,03
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	296.758.000	290.056.050	97,74
Pengadaan peralatan gedung kantor	156.365.000	147.105.750	94,08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	197.500.000	193.490.600	97,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operator	348.309.000	221.219.695	63,51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	42.000.000	41.946.500	99,87
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	311.965.000	294.748.950	94,48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39.759.000	35.363.330	88,94
Penilaian Angka Kredit	14.759.000	10.593.590	71,78
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Aparatur	25.000.000	24.769.740	99,08
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	24.129.450	96,52
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	24.129.450	96,52

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,432,341,000	2,125,022,615	87.37%
Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Ketrampilan (DBHCHT)	290,000,000	285,455,500	98.43%
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker	465,000,000	454,817,000	97.81%
Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)	187,341,000	184,878,600	98.69%
Pelatihan dan Ketrampilan (DBHCHT)	460,000,000	442,170,050	96.12%
Rehabilitasi Gedung (Workshop) BLK (DBHCHT)	675,000,000	596,350,150	88.35%
Optimalisasi data ketenagakerjaan, sosial dan ketrasmigrasian	125,000,000	111,439,815	89.15%
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	50,000,000	49,911,500	99.82%
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja / Sertifikasi Tenaga Kerja (DBHCHT)	180,000,000	179,699,830	99.83%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	643,240,000	626,732,000	97.43%
Fasilitasi Sertifikasi Halal	150,000,000	149,999,925	100.00%
Sosialisasi PIRT UMKM	195,800,000	189,495,750	96.78%
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	173.632.000	144.398.980	83,16
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	108.067.000	94.759.925	87,69
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM	65.565.000	49.639.055	75,71
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.695.453.000	1.596.865.371	94,19
Pembinaan dan pengendalian LPPS dan LPTKS	33.416.000	23.063.000	69,02
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAL, AKAD, AKAN	50.000.000	50.000.000	100,00
Pembinaan dan Monitoring LPKS	29.534.000	26.223.400	88,79
Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) (DBHCHT)	505.000.000	477.225.546	94,50

Pelatihan Keterampilan di lokasi penghasil tembakau (DBHCHT)	954.516.000	927.693.925	97,19
Informasi Pasar Kerja/Job Fair	122.987.000	92.659.500	75,34
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	170.000.000	165.127.350	97,13
Pembinaan Ketrampilan Masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	170.000.000	165.127.350	97,13
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288.759.000	281.497.760	97,49
Pelaksanaan fungsi Dewan Pengupahan	78.712.000	77.145.760	98,01
Penyelesaian dan pencegahan PHI dan PHK	14.517.000	14.481.450	99,76
Bimbingan teknis penyelesaian PHI dan PHK	30.090.000	30.089.900	100,00
Lembaga Kerjasama Tripartite	54.114.000	52.704.400	97,40
Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan UMK	45.610.000	45.069.800	98,82
Fasilitasi May Day (Hari Buruh)	65.716.000	62.006.450	94,36
Program Penataan Struktur Industri	87.122.000	76.294.500	87,57
Penyusunan Perda tentang Kebijakan Industri Daerah	87.122.000	76.294.500	87,57
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.410.893.000	1.083.789.941	76,82
Pendampingan/Pengembangan Produk OVOP	732.323.000	485.594.400	66,31
Pengembangan Sentra Industri Kecil (DBHCHT)	350.000.000	307.075.069	87,84
Dekranasda	328.570.000	291.119.851	88,60
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	27.500.000	26.707.890	97,72
Penyusunan Renja SKPD	17.500.000	16.884.225	96,48
Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000	9.823.665	98,24

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Analisa hasil kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang selama satu tahun anggaran 2017 dikategorikan **sangat baik**, dikatakan demikian karena dari kelima sasaran rata-rata mendapat nilai 100% (dua belas program) dan lima program rata-rata mendapat nilai 85% capaian < 100

B. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum adalah:

1. Sebagian aparatur sudah semakin memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program / kegiatan masing-masing.
2. Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai objek pembangunan berpartisipasi aktif menerima dan melaksanakan program / kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Dukungan dana / anggaran yang ada dari pemerintah tepat sasaran, prinsip manajemen akuntabilitas keuangan pemerintah mendukung setiap program dan sasaran dapat berjalan dengan baik.

C. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja secara keseluruhan sangat baik, meski ada kendala yang dihadapi dan untuk mengatasi hambatan tersebut kami terus meningkatkan kinerja dengan mengacu asas optimalisasi kinerja dan berpegang pada asas efektifitas dan efisiensi.

D. Strategi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka pencapaian seratus persen sasaran tersebut, yaitu :

1. Terus meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur.
2. Mengupayakan pengalokasian dana / anggaran yang lebih banyak dalam rangka pencapaian sasaran yang lebih banyak dan tepat sasaran.
3. Mengajak peran serta masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menangkap peluang kerja maupun peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengupayakan perencanaan penggunaan dana / anggaran dalam kegiatan yang lebih tepat sasaran, baik input, output, outcome, benefit, maupun impactnya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Magelang serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang..

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGELANG



ENDOT SUDIYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 198903 1 005